

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri merupakan tantangan yang harus di terima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Di indonesia, peran pemerintah sangat penting dalam perkembangan sektor publik mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang mendominasi di negara ini. Sektor publik dapat dipahami sebagai penyedia layanan umum maupun kepentingan publik dengan tujuan tanpa mencari laba (*non profit*) dari pihak pemerintah kepada masyarakat baik berupa barang ataupun jasa. Kini, kinerja instansi pemerintahan menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai kinerja organisasi sektor publik yang tidak efisien, sebagai bentuk pemborosan, sumber kebocoran dana, dan selalu merugikan institusi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut agar pemerintah dikelola secara profesional dan dilakukannya suatu transparansi serta akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian dan statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintahan daerah tidak akan dapat melakukan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Berikut adalah rencana dan realisasi anggaran belanja daerah tahun 2014 berdasarkan Badan Pusatk Statistik Kota Mojokerto

Tabel 1.1 Anggaran Belanja Daerah

Uraian Belanja	2014	
	Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah (Rupiah)	
	Rencana	Realisasi
Belanja	734 298 241 777	631 979 414 510
1.1 Belanja Operasi	541 582 130 815	490 179 894 979
1.1.1 Belanja Pegawai	290 018 255 365	268 740 132 667
1.1.2 Belanja Pegawai	222 628 149 500	199 403 909 240
1.1.3 Belanja Bunga	-	-
1.1.4 Belanja Subsidi	487 949 950	452 105 072
1.1.5 Belanja Hibah	25 980 526 000	19 881 498 000
1.1.6 Belanja Bantuan Sosial	2 467 250 000	1 702 250 000
1.2 Belanja Modal	191 881 698 755	141 591 947 931
1.3 Belanja Tak Terduga	834 412 207	207 571 600

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota/kabupaten di provinsi Jawa Timur yang pemerintahannya senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun provinsi. Penyerapan anggaran tahun 2016 menembus angka 91% dari APBD sebesar Rp 1,007 triliun. Naik dibandingkan tahun 2015 sebesar 85%. Tahun 2017 dengan APBD yang turun 10% menjadi Rp 915 miliar. Wali kota Mojokerto berharap serapan anggaran tahun 2017 bisa sampai 95%. Data yang dihimpun, realisasi penyerapan APBD 2016, dari 41 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum maksimal. *Mapping* anggaran tahun lalu yakni sebesar Rp 1.018.342.017.074 hanya terealisasi Rp 934.766.519.782 atau 91,7%. Dalam rincian realisasi penyerapan anggaran yang dikeluarkan badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (BPPKA) kota Mojokerto sempat menyebutkan, minimnya pelaksanaan kegiatan ini membuat Rp 83.575.497.292 dana teralokasi gagal serap. Kepala BPPKA kota Mojokerto, Agung Moeljono menegaskan bahwa berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang telah dicairkan mulai 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi anggaran mencapai 91,7%.

Dengan adanya pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus segala kepentingan daerah masing-masing, pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari perangkat daerah tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah daerah yang menjadi pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat wajib

untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggung jawaban daerahnya untuk dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidak baik. Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan analisis rasio. Penelitian ini akan dilakukan pada pemerintah kota Mojokerto.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan analisa terhadap kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pemerintah kota Mojokerto tahun 2015 -2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pemerintahan kota Mojokerto tahun 2016 – 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota Mojokerto ditinjau dari rasio keuangan pemerintah kota Mojokerto tahun 2016 – 2018, dan menganalisis kemampuan keuangan pemerintah kota Mojokerto ditinjau dari rasio keuangan dalam pelaksanaan periode 2016 – 2018.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan dan kemampuan pemerintah kota Mojokerto.

2. Praktis

- Pemerintah

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah kota dalam menentukan kebijakan, dan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan daerah.

- Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan menganalisa kinerja keuangan dan kemampuan keuangan dengan mengacu pada laporan realisasi anggaran pendapatan, dan belanja daerah yang diteliti, dan penelitian ini dilakukan pada pemerintah kota Mojokerto, sehingga kesimpulan pada penelitian ini hanya berlaku bagi pemerintah kota Mojokerto.